



RELASI STAKEHOLDER KEPARIWISATAAN DALAM UPAYA BERTAHAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (ANALISIS FRAMING BERITA BALI POST SELAMA 2021)

Ni Nyoman Citta Maya Dewi ^{a,1}

Ida Ayu Tary Puspa ^a

I Gede Januariawan ^a

^a Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa

¹Corresponding Author, email: citta.maya28@gmail.com (Dewi)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 12-02-2023

Revised: 08-03-2023

Accepted: 15-04-2023

Published: 30-03-2023

Keywords:

Covid-19 pandemic,
tourism
stakeholders,
power, relation

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has lasted for more than two years and has had a significant impact on Bali's tourism and economy. The phenomenon of the Covid-19 pandemic and efforts to survive by tourism stakeholders in Bali have not escaped media interference. The focus of this research is to analyze tourism stakeholder relations in Badung and Denpasar in an effort to survive in the Covid-19 pandemic based on the Bali Post mass media framing analysis. With descriptive qualitative research, the results of the analysis using the Robert N. Entman framing model method are written in narrative form. After being analyzed using the framing method, then each problem formulation is dissected with the social construction theory of mass media, organizational control theory and agenda setting theory, as well as framing theory. As a result, power relations are obtained from the government to tourism actors in the tourism and media industries. This power relationship is asymmetrical from the government to tourism actors. In this effort to survive, obstacles were also found, especially personal barriers such as emotions, prejudices, and biases from tourism actors to the government, causing conflict. However, with the theory of organizational control carried out by the government, the implication is to create a conducive and orderly atmosphere among tourism actors. There are two efforts found, namely technical and non-technical efforts. These efforts have made tourism actors able to survive in the Covid-19 pandemic.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 melanda Bali selama dua tahun lebih sehingga berdampak signifikan terhadap pariwisata dan ekonomi Bali. Komponen pariwisata yang terdiri dari pelaku usaha di bidang pariwisata yakni: hotel, restaurant, tempat wisata, taman rekreasi, angkutan pariwisata, guide, komponen pemerintah, dan juga masyarakat terdampak cukup parah, karena lebih dari

50% perekonomian Bali bergantung pada pariwisata. Khususnya pelaku usaha pariwisata yang terpaksa menutup operasional usahanya sehingga berdampak pada terjadinya pengangguran hingga PHK.

Sebanyak 48 hotel dijual atau berpindah tangan akibat tak mampu menanggung biaya operasional (Bali Post, edisi 30 Juli 2021). Berdasarkan Data Indonesia.id yang dikutip dari laman Lamudi.co.id, terdapat 2.730 hotel dijual di Indonesia. Melihat sebarannya,

penjualan hotel terbanyak terjadi di Provinsi Bali sebanyak 951 unit. Selain itu juga berdampak pada pengangguran pada Februari 2021 tercatat 5,42% dari jumlah angkatan kerja. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan sebelum pandemi yaitu, pada Februari 2019, jumlah pengangguran hanya 1,19% (Bali Post, edisi 6 Mei 2021).

Fenomena pandemi Covid-19 serta upaya-upaya bertahan yang dilakukan stakeholder kepariwisataan di Bali tidak luput dari campur tangan media. Hal ini karena media sebagai alat penyampai informasi baik media cetak, elektronik, online. Media massa memiliki produk pers yang berpedoman pada etika jurnalistik. Fungsi pers adalah penyambung lidah atau penyampai pesan kepada khalayak (Kustadi, 2004: 103). Fungsi pers juga terlihat pada bidang Pendidikan, penerangan dan komentar. Khusus fungsi pers dalam bidang penerangan menurut Lievegoed dalam kuliah umumnya di Universitas Leiden pada 1931, dibagi menjadi empat macam pekerjaan (Rochady, 1970:7). Yaitu, sebagai karya mendidik, kedua sebagai karya penghubung, ketiga, membentuk pendapat umum dan keempat sebagai kontrol.

Banjir informasi tentang pandemi Covid-19 telah memberikan pilihan pada masyarakat, cara menginterpretasi informasi terutama dalam hal mencegah agar terinfeksi Covid-19. Setidaknya dari terpaan media, masyarakat mengenal tentang protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19. Menurut Jurnal Santoso S. Amijoyo (2000), setidaknya terpaan media mampu memberikan efek kognitif walaupun belum menyentuh sampai efek afektif dan perubahan perilaku.

Bali Post merupakan media massa tertua di Bali dan terbesar di Bali. Selain itu, karakter media masa ini berafiliasi dengan penguasa saat ini, terutama dalam hal penanganan Pandemi Covid-19. Tidak hanya memberitakan seputar penanganan Covid-19, Bali Post juga banyak memberitakan terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan stakeholder kepariwisataan.

Berdasarkan hasil observasi awal terkait berita penanganan Covid-19 yang dilakukan stakeholder kepariwisataan dari sudut pandang pekerja pariwisata sangat minim, bahkan tidak ada. Pemberitaan lebih banyak menggunakan sudut pandang pengusaha dan pemerintah. Padahal stakeholder kepariwisataan tidak hanya pemerintah dan pengusaha tapi juga pekerja pariwisata. Dengan melihat ketimpangan tersebut, mengindikasikan terjadi relasi atau hubungan yang dominan dari pemerintah maupun pelaku usaha sehingga menunjukkan adanya hubungan kekuasaan dari pemerintah ke stakeholder pariwisata atau dari pengusaha ke stakeholder pariwisata. Ketimpangan pemberitaan yang disajikan Bali Post inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam. Relasi apa yang dibangun stakeholder kepariwisataan dalam upaya bertahan di tengah Pandemi Covid-19 serta implikasi dari relasi yang dibangun tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif dengan menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman. Penelitian ini merupakan analisis teks berita koran Bali Post selama tahun 2021 dengan lokus pemberitaan khususnya di Badung dan Denpasar. Analisis framing terhadap teks – teks koran dilakukan selama satu bulan. Analisis adalah proses mengurai menjadi bagian-bagian, dimulai dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (Satori.2011:97).

Data dari hasil analisis framing diolah dan disusun. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan teknik purposive sampling. Nasution (2002: 98) menyatakan dalam Purposive sampling digunakan dengan memilih orang-orang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh informan, berdasarkan kebutuhan data penelitian. Hasil analisis data koran kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Data ini kemudian disimpulkan dan diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Relasi Stakeholder Kepariwisata di Badung dan Denpasar dalam Framing Berita Bali Post

Hasil penelitian, ditemukan relasi kekuasaan dari pemerintah ke stakeholder kepariwisataan meliputi pelaku usaha pariwisata, pekerja pariwisata dan media massa. Relasi kekuasaan tersebut berifat dominansi. Relasi kekuasaan terjadi karena adanya kekuatan (power) dari pemerintah yang dapat menekan stakeholder kepariwisataan termasuk pengusaha untuk mengikuti kebijakan pemerintah. Kekuatan tersebut berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19, yang mana jika pelanggaran dilakukan bukan hanya sanksi dari pemerintah yang didapat pelaku pariwisata tapi juga sanksi sosial yang dialamatkan masyarakat pada pelaku usaha sebagai penyebab penularan Covid-19, karena tidak patuh. Dengan demikian pelaku pariwisata yang merasa dirugikan dengan kebijakan pemerintah juga akan merasa bersalah pada masyarakat jika aturan tidak dilakukan.

Seperti dijelaskan Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok lain atau pihak lain sesuai dengan kehendak dari kekuasaan. Kekuasaan meliputi kemampuan untuk menundukkan kelompok tertentu atau orang dan juga menegakkan peraturan – peraturan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi tindakan kelompok lain. Max Weber menyatakan bahwa kekuasaan adalah peluang seseorang atau kelompok orang untuk menerapkan atau mengaplikasikan kemauan-kemauannya sendiri terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau kelompok – kelompok tertentu (Max Weber, 1946: 180 dalam LittleJohn, 2002).

Berdasarkan hasil seleksi berita Bali Post selama 2021 yang berkaitan dengan pariwisata dan pandemi Covid-19, peneliti menemukan 171 berita yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil seleksi berita, peneliti hanya melakukan analisis framing pada 31 berita, karena ada beberapa berita yang memiliki kesamaan tema dan cara *framing* yang sama. Berita yang dianalisis hanya pada

halaman 1. Berita yang dipilih untuk dianalisis adalah berita yang mengandung unsur upaya – upaya bertahan dari Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh stakeholder kepariwisataan yang terdiri dari tiga komponen yaitu pekerja pariwisata, pelaku usaha dan pemerintah. Naskah – naskah berita yang dipilih, dianalisis *framing* menggunakan model Robert Entman.

Dominasi pemerintah pada stakeholder kepariwisataan terlihat pada berita dengan judul: “Perketat Prokes, Fokus Garap Wisdom”, edisi 6 Januari 2021. Pemerintah berupaya memberikan saran kepada pelaku usaha pariwisata agar menggarap wisatawan domestik sehingga kinerja dunia usaha di bidang pariwisata tetap bisa berjalan. Pemda khususnya Dinas Pariwisata Bali berupaya melakukan cara – cara persuasif agar pelaku usaha mau menggarap pasar domestik yaitu dengan menyampaikan data – data yang bersifat argumentatif, agar pelaku pariwisata mau menggarap wisatawan domestik. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari isi berita berikut:

“Potensi wisatawan domestik cukup besar sehingga di masa pandemi Covid-19, pemerintah menyarankan pelaku usaha pariwisata menggarap pasar domestik. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa mengatakan, kunjungan wisdom ke Bali sangat potensial. Terbukti, selama libur Natal dan Tahun Baru 2021, kunjungan wisdom meningkat signifikan. Mulai 17 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021, jumlahnya mencapai sekitar 350 ribu orang”

Sebelumnya, wisatawan domestik merupakan wisatawan kelas dua bagi pelaku usaha pariwisata Bali karena lama tinggal dan *spending money* yang rendah dibandingkan dengan wisatawan asing sehingga ada keengganan untuk menggarap pasar domestik. Selain menyarankan pelaku pariwisata untuk mengubah pasar yang tidak biasa dilayani pelaku pariwisata di Bali, pemerintah juga memberlakukan kebijakan yang terkesan memaksa pengusaha dan pelaku pariwisata lainnya. Hasil analisis *framing* ditemukan terdapat unsur pemaksaan atau sikap otoriter dalam penerapan kebijakan pemerintah yang

diterapkan kepada pelaku usaha. Peneliti juga menemukan ketidakberdayaan pelaku usaha dan pelaku pariwisata lainnya untuk melanggar atau menolak kebijakan tersebut karena kondisi pandemi Covid-19.

Hasil wawancara dengan Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali Dr. Agus Made Yoga Iswara pada 23 Maret 2023, menyebutkan bahwa alasan pelaku pariwisata mau mengikuti instruksi pemerintah karena pandemi merupakan peristiwa yang tak pernah dialami seluruh negara dan seluruh bidang usaha, tak terkecuali bidang usaha pariwisata. Ketidakhahaman pada situasi dan kondisi pandemi tersebut membuat pelaku usaha akhirnya menuruti kebijakan tersebut.

Seperti terlihat dari pernyataan Ketua Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) Bali Agung Agra Putra pada berita, yang menyampaikan rasa ketidakadilan yang dialami dari perlakuan pemerintah. Hal itu terlihat pada berita dengan judul "Pemerintah Diminta Bantu Beban Pengusaha" edisi 13 Juli 2021. Pengusaha merasa tidak adil karena selama ini mereka telah berupaya mengikuti instruksi pemerintah, namun mereka tidak serta merta mendapat kemudahan memperoleh bantuan dari pemerintah seperti kemudahan dalam hal keuangan di perbankan. Hal itu terlihat dari kalimat pada berita yang ditonjolkan Bali Post yaitu:

Aturan PPKM Darurat yang salah satunya adalah 100% sektor nonesensial work from home (WFH), berdampak pada pendapatan pelaku usaha sehingga segala beban yang muncul selama ini juga diharapkan dapat dibantu oleh pemerintah.

Kalimat lain yang menyatakan hal itu juga terlihat dari:

"Meski berat dan tidak tahu arah ekonomi ke depan, namun Agung Agra tetap berupaya mengikuti instruksi pemerintah untuk membantu memutus penularan Covid-19".

Pemerintah diposisikan sebagai aktor sumber penyebab permasalahan sedangkan korbannya adalah pengusaha khususnya di Bali. Bali Post memposisikan pemerintah sebagai penyebab mobilitas penduduk masih

tinggi karena kebijakan yang diterapkan tidak disertai dengan bantuan atau solusi sehingga penularan Covid-19 sulit dikendalikan. Pemerintah juga yang menyebabkan pengusaha sengsara karena kebijakan menutup usaha khususnya sektor non esensial. Terungkap dari berita dalam paragraf berikut:

Ketua Aprindo Bali, Agung Agra Putra, Senin (12/7) kemarin menegaskan salah satu cara untuk dapat mengurangi mobilitas penduduk, kebutuhan pokok masyarakat juga harus dipenuhi. Karena jika kebutuhan pokok tidak dipenuhi, maka akan sulit menghentikan atau mengurangi mobilitas masyarakat. "Sepanjang kebutuhan pokoknya tidak bisa dipenuhi mereka akan tetap keluar bekerja dan mencari makan," tandasnya.

Dominansi pemerintah pada media dikarenakan adanya unsur kerjasama, namun hasil penelitian menunjukkan, Bali Post tetap menggunakan acuan kode etik jurnalistik dan mengukur nilai berita sebelum diterbitkan sehingga tidak serta merta dengan alasan kerjasama dengan pemerintah dapat meloloskan penayangan setiap berita dengan sudut pandang pemerintah. Media massa memiliki mekanismenya sendiri dalam menayangkan berita layak atau tidaknya diterbitkan.

Barus (2010, 31 dalam Kun Wazis 2018) menyebutkan, dalam menentukan berita layak atau tidak diterbitkan terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan diantaranya: 1) Penting (*significance*): memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat atau berdampak luas terhadap pembaca; 2) Besaran (*magnitude*): besaran dampak dari kasus atau isu baik dari sisi jumlah, nilai, atau angka yang besar sehingga menjadi informasi yang menarik untuk diketahui; 3) Kebaruan (*timeless*): berita atau isu tersebut bersifat baru (aktual), belum lama terjadi yang dinilai masih menarik untuk diketahui khalayak; 4) Kedekatan (*proximity*): mempunyai kedekatan geografis, emosional dengan pembaca termasuk kedekatan profesi, nasib dan perhatian pembaca; 5) Ketermukaan (*prominence*): berita atau isu yang melibatkan atau terkait dengan orang terkenal, tokoh,

pejabat, artis, dll; 6) Sentuhan manusiawi (*human interest*): berita atau isu yang menyentuh rasa kemanusiaan serta menggugah hati dan perasaan.

Berita yang ditayangkan Bali Post juga mengandung nilai berita seperti yang diungkapkan Barus. Selain itu, nilai berita terutama memiliki asas kemanfaatan bagi semua pihak, sehingga bukan hanya sekedar faktor kerjasama, namun dalam proses menentukan berita yang akan ditayangkan di koran, terutama pada halaman 1, pemetaan isu dilakukan pada saat koordinasi liputan.

B. Hambatan dan Implikasi Relasi Stakeholder Kepariwisatawaan di Badung dan Denpasar Dalam Framing Berita Bali Post

Hambatan Komunikasi Relasi Stakeholder Kepariwisatawaan di Badung dan Denpasar dalam Framing Berita Bali Post

Terjadi hambatan komunikasi personal pelaku pariwisata berupa emosi, sikap, dan prasangka terhadap pemerintah. Dominansi konflik terjadi antara pelaku usaha dan pemerintah sementara, konflik antara pekerja dengan pengusaha atau owner tidak ditangkap oleh Bali Post sebagai sebuah berita yang layak ditayangkan pada halaman 1. Hambatan komunikasi ini hampir menyebabkan terjadinya konflik besar antara pelaku pariwisata dengan pemerintah di penghujung tahun 2021. Berita dengan judul “Pemerintah Diminta Bantu Beban Pengusaha” edisi 13 Juli 2023 dan “Forum Bali Bangkit Desak Pusat Revisi Regulasi” edisi 28 Oktober 2021 menggambarkan situasi pengusaha dan pelaku usaha yang berada di puncak kesabaran, ketika telah mengikuti instruksi pemerintah dari sejak awal Covid-19 sampai dengan dibukanya border internasional, mereka tidak serta merta terbantu dengan upaya yang telah dilakukan tersebut. Berikut hasil analisis framing berita “Forum Bali Bangkit Desak Pusat Revisi Regulasi”.

24.

Judul Berita	Forum Bali Bangkit Desak Pusat Revisi Regulasi
Edisi	28 Oktober 2021
Problem Identification	Ketidakpuasan Forum Bali Bangkit yang terdiri dari pelaku pariwisata. Forum Bali Bangkit mendesak pemerintah pusat untuk merevisi beberapa regulasi yang dinilai kontrakproduktif untuk pemulihan pariwisata Bali . <i>Forum Bali Bangkit mendatangi kantor DPRD Provinsi Bali pada Selasa (26/10) untuk menyalurkan aspirasi kalangan pariwisata . Adanya tumpang-tindih kebijakan pemerintah pusat terkait dibukanya pariwisata Bali merugikan mereka .</i>
Causal Interpretation	Tumpang tindih aturan pemerintah menyulitkan kedatangan wisatawan bahkan hingga membatalkan kunjungan. Forum Bali Bangkit beralasan bahwa peraturan tersebut tidak mendukung pemulihan ekonomi Bali yang menjadi tujuan pemerintah. Di sisi lain pemerintah memperketat aturan yang berdampak pada ekonomi. Terjadi dualisme pemikiran diantara pengambil kebijakan sendiri yaitu pemerintah. Dualisme tersebut bisa mengindikasikan keragu-raguan pemerintah mengambil kebijakan. Sikap tersebut merugikan pelaku usaha di Bali. <i>Forum Bali Bangkit mengaku menjadi korban kebijakan yang tak mendukung pemulihan ekonomi Bali . Tumpang-tindih aturan hendaknya segera direvisi . Langkah ini diharapkan bisa menekan tingginya angka pembatalan kunjungan .</i>
Moral Evaluation	Forum Bali Bangkit membawa misi gerakan moral untuk membangkitkan Kembali perekonomian Bali. Hal tertulis dalam statement Yoga Iswara: <i>Perwakilan Forum Bali Bangkit Yoga Iswara mengatakan , Forum Bali Bangkit sebagai aliansi 38 asosiasi secara konsisten melakukan gerakan moral sebagai langkah strategis dan teknis untuk mewujudkan bangkitnya pariwisata Bali tanpa didasari atas kepentingan individu , golongan ataupun yang lainnya .</i> Terlihat bahwa Yoga Iswara ingin membawa misi moral membangkitkan pariwisata Bali, tidak ada motif – motif lain yang ingin diwujudkan, karena dengan bangkitnya pariwisata akan berdampak kepada semua elemen di pelaku pariwisata.

Berita dengan judul “Langkah Tepat Menarik Wisatawan” (edisi 2 November 2021), “Bertemu Dubes Australia Untuk Indonesia, Gubernur Koster Tegaskan Pandemi di Bali Melandai dan Stabil” (edisi 19 November 2021), dan “FGD Ubah Laku, Kebijakan Pusat, Strategi Penyelamatan Bali” (edisi 3 Desember 2021) merupakan proses pendekatan komunikasi yang dilakukan pemerintah, yang mana sebelumnya kebijakan pemerintah sempat diragukan oleh stakeholder kepariwisataan. Menjawab keragu – raguan tersebut, pemerintah atas kerjasama yang telah terbangun dengan media massa Bali Post, berupaya menjelaskan dengan alasan – alasan yang masuk akal.

Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan hambatan atau rintangan komunikasi ini dapat diselesaikan dengan kendali organisasi yang dilakukan pemerintah. Peneliti menggunakan teori kendali organisasi yang meliputi kendali sederhana, kendali teknis, birokrasi dan kendali konsertif. Ketua IHGMA, Dr. Agus

Made Yoga Iswara saat wawancara pada 25 Maret 2023 menyampaikan bahwa dalam proses pemulihan pariwisata dan pengendalian dampak Covid-19 tidak dipungkiri kerap terjadi ketidakcocokan, tidak selaras, dan terjadi pertentangan dengan pemerintah.

“Mungkin dalam proses itu kami memiliki perbedaan – perbedaan pendapat, itu wajar apalagi kondisi saat itu masih sangat miris sekali. Kondisi Bali yang terporak-porandakan, apa yang kita kenal sebagai Orang Tanpa Gaji (OTG), emosionalnya sangat tinggi sekali. Namun yang terpenting adalah kita semua melakukan peran kita masing – masing untuk menciptakan goal besar kita bersama yaitu mewujudkan destinasi Bali yang aman dan menciptakan trust sehingga open border itu bisa dibuka dan respon pasar positif untuk melihat atau melakukan kunjungan ke Bali sehingga recovery Bali bisa berangsur – angsur pulih bahkan sekarang tahun 2023 di bulan Maret ini semakin kuat dan semakin kembali seperti di tahun 2019” kata Yoga Iswara, Ketua IHGMA.

Implikasi Relasi Stakeholder Kepariwisata di Badung dan Denpasar dalam Upaya Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19

Implikasi dari relasi stakeholder kepariwisataan yang dianalisis dengan teori agenda setting, Peneliti menemukan tercipta situasi yang kondusif karena pemerintah mampu mengatur seluruh stakeholder kepariwisataan agar mengikuti anjuran dan kebijakan pemerintah. Aturan dari pemerintah tersebut membuat tercipta suasana yang tertib di kalangan pelaku pariwisata. Dominansi peran pemerintah terhadap penanganan Covid-19 dan pemulihan pariwisata Bali membuat pemerintah dapat dengan mudah melakukan pengendalian kasus dan pemulihan pariwisata. Hubungan antarstakeholder kepariwisataan awalnya terlihat saling menyalahkan dan muncul ketidakpuasan, namun dengan mengedepankan sikap gotong royong demi tujuan bersama yaitu terkendalinya Covid-19, rasa ego dan emosi pelaku usaha dapat ditahan.

Terlihat di awal tahun 2021, pemberitaan dari pemerintah bersifat satu arah dan terkesan otoriter, namun seiring berjalannya waktu, dari agenda setting berita yang dilakukan media massa Bali Post, mempengaruhi antarstakeholder kepariwisataan. Sehingga dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penanganan Covid-19 dan penanganan dampak pandemi Covid-19, melibatkan seluruh stakeholder kepariwisataan. Pelibatan seluruh stakeholder kepariwisataan tersebut didasari rasa kekompakan dan kebersamaan dalam pengendalian Covid-19 serta pemulihan pariwisata dengan perannya masing – masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2021, Putu Astawa, dalam setiap pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan, pemerintah selalu mengawali dengan rapat – rapat dengan stakeholder pariwisata diantaranya: asosiasi pelaku pariwisata, dinas terkait, pemegang kebijakan di bandara diantaranya GM Angkasa Pura, Otoritas Bandara, Bea Cukai, Imigrasi, MDA, TNI/Polri, dan Akademisi. Hubungan yang awalnya bersifat otoriter dari pemerintah kemudian melunak menjadi hubungan kebersamaan dalam mengendalikan Covid-19 dan menangani dampak terhadap pariwisata. Hubungan tersebut membuat kondisi Bali kondusif. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2021:

“Kebijakan yang diambil pemerintah dipengaruhi oleh masukan dan saran dari stakeholder kepariwisataan. Stakeholder kepariwisataan terdiri dari : IHGMA, GIPI, Asita, dll. Ada 48 asosiasi yang selalu dirangkul pemerintah. Asosiasi itu yang selalu memberikan masukan di dalam melakukan langkah – langkah kebijakan Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali dan pemerintah pusat”. kata mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa, pada 16 Maret 2023.

Upaya Stakeholder Kepariwisata di Badung dan Denpasar Agar Mampu Bertahan di Tengah Covid-19

Berdasarkan hasil analisis framing yang dilakukan, peneliti membagi upaya yang

dilakukan stakeholder kepariwisataan dalam rangka bertahan di tengah pandemi Covid-19 terdiri dari dua yaitu:

Upaya Teknis

Hasil penelitian, upaya teknis yang dilakukan stakeholder kepariwisataan di Badung dan Denpasar dapat dirangkum diantaranya sebagai berikut: promosi, penguatan branding/menjaga citra pariwisata, mengalihkan target market dari wisman ke wisdom dengan pola FCC, seluruh fasilitas pariwisata disertifikasi CHSE, menawarkan berwisata ke zona hijau, vaksinasi pelaku pariwisata, efisiensi usaha: pengurangan /perumahan karyawan, operasional hotel baik listrik dan air diefisienkan penggunaannya, meminta keringanan dari bank untuk pembayaran kredit, meminta keringanan pembayaran listrik, inovasi produk (rencana pembangunan KEKK Sanur digaungkan).

Upaya – upaya tersebut tidak akan dapat diberlakukan secara serentak oleh stakeholder kepariwisataan di Bali tanpa adanya hubungan yang baik antarstakeholder. Hubungan yang baik tersebut mampu mempengaruhi untuk bergerak bersama memulihkan pariwisata Bali. Seperti hasil wawancara Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa dalam wawancara pada Kamis, 16 Maret 2023 menyebutkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan di bidang pariwisata, pemerintah selalu mengikutsertakan asosiasi kepariwisataan yang merupakan perwakilan dari masing – masing anggota. Dengan demikian pemerintah akan lebih mudah menyampaikan informasi sekaligus menyerap aspirasi.

“Pembangunan pariwisata di Bali didukung oleh pentahelix pariwisata. Perannya sangat penting. Pentahelix tersebut meliputi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, media massa, akademisi. Hubungan pemerintah dengan masyarakat, dengan pengusaha, media, akademisi. Akademisi juga sering dilibatkan dalam rapat – rapat diskusi sebelum menjadi kebijakan gubernur untuk menjaga dan mengawal ini.

Maka dari itu, peranan asosiasi – asosiasi sangat penting, karena lebih memudahkan dalam berkoordinasi, karena kelembagaan mereka itu sudah kuat.” kata Putu Astawa, Kepala Dinas Pariwisata Bali tahun 2021 pada Kamis, 16 Maret 2023.

Upaya Non Teknis

Hasil analisis *framing*, peneliti menemukan ada upaya non teknis yang dilakukan stakeholder kepariwisataan di Badung dan Denpasar. Yaitu, telah terbangun rasa kesadaran dan perilaku kebersamaan serta partisipatif dalam rangka penyelenggaraan pariwisata di Bali, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu penerapan Tri Hita Karana yaitu pawongan hubungan yang harmonis antarstakeholder kepariwisataan telah terjalin.

Pada saat pandemi Covid-19, penghasilan masyarakat berkurang bahkan tidak ada, namun di tengah kondisi itu para stakeholder kepariwisataan tetap berperan dalam pengendalian Covid-19 dan membantu pemulihan pariwisata sesuai profesi dan pekerjaan masing – masing dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan stakeholder kepariwisataan khususnya di industri pariwisata tersebut seperti yang tercantum dalam sloka Bhagavad Gita 3.25 yaitu:

Saktāḥ karmaṇy avidvāṁso
Yathā kurvanti bhārata
Kuryād vidvāṁs tathāsaktāś
Cikīrṣur loka-saṅgraham

Ibarat seorang bodoh yang bekerja demi hasilnya, oh Arjuna, maka seyogyanyalah seorang yang bijaksana juga bekerja, tetapi tanpa pamrih, dan dengan tujuan untuk kelangsungan hidup di dunia ini.

Penjelasan: Kontradiksi antara yang bodoh (jurang pengetahuannya) dan yang bijaksana jelas sekali di sloka atas ini. Yang pertama bekerja demi suatu motif dan untuk kepentingan dirinya sendiri, sedangkan yang bijaksana bekerja tanpa pamrih dan untuk sesamanya. Pekerjaannya sama, motif dan tujuannya lain.

Kesadaran dalam diri stakeholder pariwisata itu peneliti golongan ke dalam upaya non teknis. Upaya non teknis tersebut bersinggungan dengan upaya pendekatan agama khususnya Hindu, mengingat di Bali mayoritas masyarakat khususnya stakeholder kepariwisataan beragama Hindu. Penyadaran diri masing – masing individu stakeholder kepariwisataan membantu pengendalian Covid-19 dan pemulihan pariwisata Bali ini menumbuhkan rasa kerelaan untuk bergerak. Kesadaran masing – masing individu tersebut juga tidak lepas dari peran media.

Pemerintah melalui media juga melakukan pendekatan – pendekatan agama agar kesadaran diri masing – masing individu semakin terbuka. Pada berita Bali Post halaman 2 edisi 5 November 2021 dengan judul “Jaya Negara Hadiri Upacara Pakelem Agung Pemahayu Jagat di Pantai Matahari Terbit”. Berita tersebut bertujuan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa upaya menyeimbangkan alam Bali dari sisi agama juga dilakukan pemerintah. Selain itu, dalam upacara tersebut juga ditegaskan terkait penerapan protokol kesehatan oleh Walikota.

Pendekatan agama yang dilakukan pemerintah ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat pentingnya protokol kesehatan dan sekaligus memberi tahu khalayak bahwa ada upaya bersifat lokal genius yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian Covid-19. Penggunaan nama Jaya Negara pada judul, yang mana Jaya Negara sebagai Walikota, maka diharapkan pemimpin wilayah yang memberi contoh pelaksanaan upacara dengan protokol kesehatan dapat diikuti masyarakat.

Ada juga berita edisi 7 November 2021, Bali Post melakukan *framing* dengan sudut pandang pemberitaan dari pemerintah. Berita dengan judul “Kesederhanaan Maknai Perayaan Galungan” bertujuan agar masyarakat dapat tetap merayakan Hari Raya Galungan namun tetap pada koridor kesederhanaan. Kesederhanaan ini berkorelasi dengan tidak berkumpul atau merayakan secara besar – besaran agar penularan Covid-19 dapat dihindari. Ada pula

upaya pemerintah terkait pelaksanaan melasti ngubeng tahun 2021. Pada berita di Balipost.com yang tayang pada 3 Maret 2021 dengan judul “Zona Merah Ini, Putuskan Melasti Ngubeng”.

Berita yang berlatar di Kabupaten Badung tersebut menggunakan narasumber dari Kadis Kebudayaan Badung yang merujuk pada keputusan PHDI Badung bahwa melasti tidak diperkenankan dilakukan ke segara, beji, campuhan, namun hanya dihaturkan oleh pemangku, sertai dan prajuru desa. Meskipun dilaksanakan dengan hanya perwakilan dari pemangku dan prajuru desa, namun upacara melasti tetap bermakna untuk penyucian jagat, agar dunia khususnya Bali dapat segera mengatasi permasalahan Covid-19. Pemilihan narasumber yang ahli atau kompeten di bidangnya yaitu PHDI, MDA, dan Kepala Dinas Kebudayaan Badung, diharapkan masyarakat mau mengikuti instruksi pemerintah. Upaya pendekatan agama yang dilakukan pemerintah tersebut menimbulkan kesadaran diri dari stakeholder kepariwisataan. Kesadaran diri tersebut mendorong antarstakeholder mengusung nilai – nilai universal yaitu gotong royong dan ngayah dalam upaya bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas, relasi dan upaya yang dilakukan stakeholder kepariwisataan sesuai dengan arah pengembangan pariwisata Bali dan visi misi Gubernur Bali Wayan Koster yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Terutama dalam bidang pariwisata telah diterbitkannya Perda Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Selain berorientasi pada kualitas, kepariwisataan Bali juga berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing, sehingga diperlukan standar penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi. Standar tersebut meliputi: ramah lingkungan, keberlanjutan, keseimbangan, keberpihakan pada sumber daya lokal, kemandirian, kerakyatan, kebersamaan, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan manfaat yang diselenggarakan dalam satu

kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tatanan.

SIMPULAN

Hasil analisis yang peneliti lakukan, ditemukan adanya dominansi pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Bali. Hubungan dominansi tersebut merupakan bentuk relasi kuasa dari pemerintah. Relasi kuasa terlihat dari volume pemberitaan yang lebih banyak muncul dari sudut pandang pemerintah. Sementara dominansi pemerintah terhadap media karena adanya faktor ekonomis yang didapat dari kerjasama tersebut. Hambatan yang muncul dari proses komunikasi selama pandemi Covid-19 diantaranya: hambatan personal, fisik, budaya, dan lingkungan. Hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan kendali organisasi yang pada akhirnya menimbulkan suasana yang kondusif dalam pengendalian Covid-19 dan penanganan dampak pandemi Covid-19. Implikasi dari relasi yang dibangun stakeholder kepariwisataan di Badung dan Denpasar dalam Upaya Bertahan di Tengah Pandemi adalah hubungan yang baik, kooperatif dan kondusif antarstakeholder kepariwisataan di Badung dan Denpasar.

Dari hubungan yang baik tersebut, selain dilibatkannya pelaku usaha dalam setiap pengambilan keputusan terkait pemulihan pariwisata Bali, hubungan yang baik dan kondusif tersebut juga mampu membuat komponen pariwisata di Bali bertahan di tengah pandemi Covid-19. Upaya – upaya yang dilakukan saat Pandemi Covid-19 untuk bertahan diantaranya mengalihkan target market dari wisatawan mancanegara ke wisatawan domestik, menawarkan pola wisata Free Covid Corridor (FCC), membuka segmen wisata baru yaitu wisata kesehatan dengan dibangunnya KEKK (Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan) di Sanur, dan di awal mulainya vaksinasi, pemerintah juga menawarkan untuk berwisata di zona hijau, disamping juga upaya stakeholder kepariwisataan untuk memenuhi standar CHSE dalam setiap propertinya atau hotelnya. Selain upaya – upaya teknis yang dilakukan stakeholder kepariwisataan di Bali, juga adanya nilai – nilai yang dijunjung yaitu nilai

gotong royong, ngayah, Sagilik Saguluk, Salunglung Sabayantaka, Paras Paros Sarpanaya, Saling Asah Asih Asuh untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan manusia (pawongan).

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disampaikan saran kepada:

5.2.1 Pemerintah Provinsi Bali khususnya agar mempertahankan hubungan yang baik dengan stakeholder pariwisata, terutama dalam pengambilan kebijakan agar selalu melibatkan industri pariwisata baik pekerja atau ownernya lewat asosiasi – asosiasi. Dengan demikian permasalahan yang ada dapat dicarikan win – win solution.

5.2.2 Pengusaha agar melakukan mitigasi risiko terutama dalam hal keuangan, bisa dengan membentuk cadangan risiko agar ketika mengalami kondisi tak terduga seperti Pandemi Covid-19 dapat bertahan. Selain itu, pengusaha juga diharapkan tetap menerima masukan dari pekerja agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Selain itu kinerja pekerja juga ditentukan oleh hubungan yang baik antara owner dan pekerjanya.

5.2.3 Pekerja pariwisata agar mempertahankan sikap aktif dan gotong royong berkontribusi terhadap permasalahan dalam bidang pariwisata, karena pemerintah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sendiri. Pekerja pariwisata juga diharapkan dapat lebih bijak menyikapi setiap permasalahan dan tidak terpancing emosi agar suasana tetap kondusif. Pekerja pariwisata diharapkan juga dapat menjadi agen perubahan terhadap kondisi pariwisata Bali menuju pariwisata Bali berkualitas dan berkelanjutan.

5.2.4 Pengelola Bali Post dan akademisi adalah cahaya bagi setiap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Media massa juga menjadi agen perubahan dengan konstruksi realitas yang dilakukan sehingga diharapkan konstruksi yang dilakukan bertanggung jawab demi kemajuan bangsa dan pariwisata Bali khususnya. Bali Post juga diharapkan tetap mengutamakan profesionalisme dalam melaksanakan kerja

pers dan bersikap independent dalam memandang suatu kasus atau fenomena.

DAFTAR PUSTAKA

- Bali Post edisi 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021
- Hamijoyo, Santoso.2000. Landasan Ilmiah Komunikasi: Sebuah Pengantar.Mediator, 1, 1-10
- Little John, Stephen. 2014.Teori Komunikasi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nasution. 1992. Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.
- Parwata, Kadek. 2021. Zona Merah Ini, Putuskan Melasti Ngubeng. Badung: Balipost.com
- Rochadi, S. 1970. Wartawan Pembina Masyarakat. Bandung : Binatjipta
- Suhandang, Kustadi. 2004. Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, & Kode Etik, Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia